MADANI
JURNAL POLITIK DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022
(P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN DENGILO KABUPATEN POHUWATO

Iskandar Ibrahim

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pohuwato
Jl. Trans Sulawesi No 147 Kab. Pohuwato, Gorontalo
E-mail : iskandaribrahim64@gmail.com

Received: 04 Januari 2022; Revised: 30 Januari 2022; Accepted: 15 Februari 2022; Published: Februari 2022; Available online: Februari 2022

Abstract

This study aims to determine how the policy implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation in Dengilo District, Pohuwato Regency. The method in this research is descriptive research with a qualitative approach. Informants in this study use the purposive sampling technique from population units that are considered key informants, namely those who are directly involved and related to the implementation of PKH policies. The results showed that the goals and objectives of the Family Hope Program (PKH) in Dengilo sub-district can be stated to have been right on target and the objectives of the PKH implementation have been achieved well starting from the mechanisms and procedures, the suitability of the amount of assistance received by participants has gone well and in accordance with general guidelines for the implementation of PKH; Resources in the implementation of PKH in the Dengilo sub-district are very good in carrying out their duties, besides that they also receive direct training from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, related to the implementation of PKH; Socio-Economic Conditions in the Dengilo sub-district, many people or KPM have social or economic conditions that concern, because the level of education, skills, public awareness of education and health is still low; Characteristics of implementing agents or assistants to KPM really empower themselves as objects and implement development and provide motivation to KPM; Communication between organizations in the implementation of PKH has gone well and smoothly, this can be seen by the division of the organizational structure and division of tasks that is quite good and has a formal meeting which is held once a month.

Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program, Pohuwato

Pendahuluan

Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan. oleh karena itu, sinergis seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang perlu ditangani dalam proses pembangunan baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah, dimana kemiskinan juga identik dengan suatu penyakit.

Untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin dibutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah sebuah kebijakan yang strategis yang harus ditangani oleh pemerintah selaku agen pembangunan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya perbaikan sosial pada segenap lapisan masyarakat. Analisis masalahnya tidak hanya layak ditujukan pada perspektif masyarakat yang menerima beragam program perbaikan sosial ekonomi. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara menyeluruh sering tidak sesuai dengan kondisi dari masing masing daerah, tentu saja hal itu menyebabkan implementasinya rentan dengan berbagai bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan. Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Di Indonesia program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan.

Bicara kesejahteraan biasanya tidak akan lepas dari fenomena kemiskinan, bahwa Bangsa Indonesia dalam konstitusi di atas sudah sejak lama ingin lepas dari cengkraman kemiskinan. Fenomena kemiskinan pada bangsa Indonesia di alami sudah jauh sebelum kemerdekaan baik terjadi pada saat zaman kerajaan maupun zaman kolonial, dan hingga saat ini bangsa ini belum

lepas dari cengkrman kemiskinan. Telah banyak upaya untuk mengatasi lilitan kemiskian yang dilakukan oleh pemerintah dari rezim ke rezim.

Fenomena tersebut seperti sebuah penyakit yang sudah akut, namun masih sedang dalam perawatan serta masih di dilakukan eksperimen penyembuhannya. Bahkan, upaya pemerintah dalam mengatasi kemskinan sudah banyak di dukung dengan aturan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, serta aturan lainnya dalam mendukungya. Namun, dalam implementasinya perlu pengujian dan evaluasi yang holistik, karena realitasnya fenomena kemiskinan masih nampak dijumpai di depan mata.

Telah digulirkan beberapa program penanggulangan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Program unggulan yang diklaim pemerintah salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang juga di kenal didunia dalam menanggulangi kemiskinan kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial. Program ini memberikan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pohuwato khususnya Pemerintah Kecamatan Dengilo merespon program penanggulangan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.

Kondisi masyarakat masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak

mampu menyekolahkan anak-anak mereka, kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Menyadari akan hal itu, maka Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin. Disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin dengan persyaratan yang telah di tentukan.

Namun demikian tetaplah harus dipahami bahwa proses pengentasan kemiskinan melalui PKH ini bukanlah sebuah proses yang mudah, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kemampuan baik (*political will*),baik pemerintah (sebagai unsur pendukung) maupun dari komponen masyarakat terutama masyarakat miskin. program-program yang diberikan kepada masyarakat haruslah program yang meningkatkan kulitas manusia seperti memperbaiki pendidikan dan kesehatan, karena untuk keluar dari lingkaran kemiskinan jalan satu-satunya dapat diwujudkan jika masyarakat itu sehat dan cerdas. Dengan masyarakat sehat dan pintar masyarakat itu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Dalam jangka pendek dana bantuan PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH; (2) meningkatkan taraf pendidikan peserta; (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM);

(4) meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta PKH.

Berbagai klaim keberhasilan program kebijakan PKH baik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak lain, telah banyak diapresiasi berbagai kalangan, bahkan dari lembaga dunia seperti Bank Dunia. Peneliti mencoba menelusuri implementasi program tersebut dengan melakukan pengumpulan data literatur tertulis baik dari buku-buku, informasi media dan observasi lapangan. Peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana implementasinya di masyarakat. Tidak hanya itu, berangkat dari beberapa fenomena permasalahan dari realisasi PKH tersebut di beberapa daerah termasuk di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Berangkat dari konsep implementasi kebijakan di atas, PKH sejauh ini pelaksanaan kegiatannya sudah berlangsung 7 tahun di Indonesia dan di Wilayah Kabupaten Pohuwato sendiri sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Sementara bicara hasil dari implementasi PKH ini masih belum memuaskan. Maka untuk melihat permasalahan tersebut lebih dalam, perlu mengkaji apa hambatan dan permasalahan dalam realisasi kebijakan PKH tersebut. Misalnya dari observasi awal penulis serta hasil wawancara awal dengan beberapa penerima PKH dan Pendamping pelaksana PKH, bahwa beberapa wilayah di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato desanya terletak jauh dari akses pendidikan dan kesehatan. Kemudian, meskipun akses tersebut sudah dijamin bebas biaya, RTSM menjadi kesulitan dalam memperoleh akses tersebut.

Pendamping PKH juga belum melaksanakan beberapa fungsi dari tujuan PKH itu sendiri, yaitu meyadarkan RTSM akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Sehingga program PKH tersebut berjalan berkesinambungan. Ditemukan masalah lain yaitu masih rendahnya pemahaman peserta terhadap maksud dan tujuan PKH, peserta menerima bantuan tunai tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PKH, masih adanya kasus anak putus sekolah atau tidak melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta pelayanan kesehatan bagi RTSM yang menggunakan kartu PKH masih mengalami kendala.

Permasalahan tersebut diindikasikan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya sosialisasi dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan

(UPPKH), lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta, dana PKH yang diberikan tidak cukup untuk biaya sekolah anak, adanya kesalahan memfungsikan dana PKH yang diberikan kepada RTSM untuk hal-hal tidak dianjurkan dalam program PKH. Selain itu permasalahan lain adalah kurang tepat sasaran dalam melakukan pendataan RTSM sebagai penerima manfaat PKH.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji dan mengetahui lebih dalam berkaitan keberhasilan implementasi program keluarga harapan yang sudah digulirkan sejak lama oleh pemerintah dengan mengangkan judul penelitian yaitu "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato".

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye dalam Said Zainal (2004:20) menyatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Sejalan dengan pendapat Easton dalam Said Zainal (2004:20) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organnisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

H.Hugh Heglo dalam Said Zainal (2004:21) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai *"a course of acion intended to accomplish some end"* atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Defenisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan yang menyatakan bahwa : Pertama, tujuan.yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired end ts to be achievmen*). Bukan suatu tujuan yang sejedar diinginkan saja dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang bolej saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehiduupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan jika ada usaha untuk mencapainya, dan

ada factor pendukung yang diperlukan. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat,keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima, dampak (efek) yakni dampak yang timbull dari satu program dalam masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting didalam kebijakan publik ada beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian implementasi kebijakan publik. Huntington dalam Hesel (2003:17) bahkan berpendapat bahwa, perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan implementasi atau melaksanaan pemerintahan.

Menurut Robert dan Frank dalam Hesel (2003:17) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wild dalam Hesel (2003:17) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana dalam mencapai tindakan tersebut atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara mencapainya.

Kebanyakan beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Menurut Islamy dalam Fadillah (2003:79) menyatakan bahwa sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan Negara yang bersifat *selfexecuting*. Maksudnya dengan dirumuskan kebijakan tersebut sekaligus atau dengan sendirinya kebijakan itu terimplementasi. Yang paling banyak

adalah yang bersifat *non selfexecuting*, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan.

Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifatsituasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemerdayaan.

Konsep Kemiskinan

Ada beberapa para ahli yang mengutarakan tentang kemiskinan. Salah satunya menurut Suharto dalam Agus (2014:9) menyatakan bahwa: Kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan actual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna, penemu-kenalan konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan mungkin "misteri" mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula masalah ini masih hadir ditengah-tengah kita bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah mengalami tahap kejenuhan sejak pertengahan 1980 an, upaya pengentasan kemiskinan kini semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang.

Beberapa alasan yang mendasari pendapat ini antara lain adalah :

Pertama, menurut Chambers dalam Agus (2014:10) menyatakan bahwa : Konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni kemiskinan pendapatan atau "income property". Pendekatan ini banyak dikritik oleh para pakar ilmu sosial sebagai pendekatan yang kurang bisa menggambarkann potret kemiskinan secara lengkap. Kemiskinan seakanakan hanyalah masalah ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya pendapatan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa menunjukkan angka yang tinggi, baik secara absolut maupun relative, di pedesaan maupun perkotaan meskipun Indonesia pernah dicatat sebagai salah satu negara berkembang yang sukses dan mengentaskan kemiskinan, ternyata masalah kemiskinan kembali menjadi isu sentral di tanah air karena bukan saja jumlahnya yang kembali meningkat, melainkan dimensinya pun semakin kompleks seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat terpaan krisis ekonomi sejak tahun 1997.

Ketiga, menurut Suharto dalam Agus (2014:10) menyatakan bahwa : kemiskinan mempunyai dampak yang negative yang bersifat menyebar (multiplier efec) terhdap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Berbagai konflik di tanah air yang terjadi sepanjang krisi ekonomi,misal nya menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukanlah semat-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional.

Sadar bahwa isu kemiskinanan merupakan masalah laten yang senantiasa actual, pengajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi maslaah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk membuat deksriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara hubungan antar fenomenal yang disidiki mengenai Implementasi Kebijakan Program

Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato direncanakan selama 4 bulan.

Hasil Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan RTSM yang ditetapkan. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran penerima PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan).

Dalam mengukur tingkat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dengilo, peneliti menggunakan 5 (Lima) indikator Implementasi yang bersumber dari Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009: 38) yakni ; Standar dan Sasaran Kebijakan; Kondisi Sosial Ekonomi; Sumberdaya; Karakteristik badan pelaksana; Komunikasi antar organisasi. Adapun hasil penelitian dari keenam indikator implementasi diuraikan sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dimana dalam penetapan sasaran memperhatikan sumber data, yaitu data terpadu program penanganan fakir miskin dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan salah satunya skala prioritas percepatan wilayah penanggulangan kemiskinan, wilayah korban bencana sosial, dan

wilayah perbatasan dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Berkaitan dengan sasaran kebijakan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Adapun pertanyaannya adalah mengenai tujuan dan sasaran yang terdapat pada Program Keluarga Harapan yang disampaikan oleh informan selaku Fasilitator Kecamatan Dengilo, pada tanggal 10 Desember 2021.

"Tujuan dari PKH ini, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu PKH ini tujuannya mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Dapat dikatakan bahwa PKH ini semata-mata untuk membantu masyarakat yang miskin. (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Wawancara tersebut di perkuat oleh informan yakni coordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten pohuwato ketika di temui peneliti, pada tanggal 10 Desember 2021:

"Tujuan PKH pada dasarnya dapat meningkatkan taraf hidup kelompok penerima manfaat, serta menciptakan perubahan perilaku kemandirian dalam mengakses layanan kesehatan, dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Disamping itu tujuan PKH juga dapat mengurangi kemiskinan dan kesejangan masyarakat". (Transkrip Wawancara : Desember 2021),

Hal senada pula disampaikan oleh Pendamping PKH wilayah kecamatan dengilo saat di temui peneliti dikatakan bahwa :

"Tujuan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, kerena setiap bulan penerima manfaat mendapat bantuan". (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Selain itu berkaitan dengan sasaran dan standar kebijakan, peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan sasaran program yang menjadi target dalam menerima bantuan PKH. Dimana menurut salah satu informan yakni

Pendamping PKH Kecamatan Dengilo saat di wawancarai menyatakan :

"Sasaran dan target selaku penerima bantuan atau yang berhak mendapatkan PKH ini adalah masyarakat yang termasuk dalam DTKS desil 1 dan 2, dan akan di saring lewat aplikasi oleh pusat, yang proses pendataannya meliputi 3 komponen yaitu ; komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil dan anak usia dini, kemudian komponen pendidikan yang meliputi anak usia sekolah umur 6-21 tahun yang menempuh tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA, kemudian komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia dan penyandang disabilitas berat". (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Kemudian berkaitan dengan indikator standar dan sasaran kebijakan lainya adalah pertanyaan mengenai manfaat yang diapatkan masyarakat dengan adanya bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan dengilo, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya yakni masyarakat penerima PKH, dimana uraian hasil wawacara tersebut seperti dibawah ini :

Menurut salah satu informan (SL) yakni masyarakat penerima manfaat PKH ketika di wawancarai peneliti di rumahnya pada tanggal 12 Desember 2021 dikatakan bahwa :

"Alhamdulilah, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yakni kementerian sosial, pemerintah kabupaten pohuwato, kecamatan dan pemerintah desa yang telah mengusulkan keluarga saya sebagai penerima manfaat PKH ini, dimana kami sekeluarga sangat terbantu sekali dengan program ini, karena program ini benar-benar menyentuh pada kebutuhan utama kami yang mungkin sulit kami wujudkan dalam kondisi sekarang ini, kami sangat terbantu sekali terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, dimana ada anak saya yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat atas karena kekurangan biaya, namun dengan adanya PKH sekarang anak saya sudah masuk kelas ujian yang sebentar lagi akan lulus SLTA."(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara data penerima PKH di kecamatan dengilo tersebut, maka dalam cermatan peneliti menunjukan bahwa dengan adanya bantuan pemerintah pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga yang kurang mampu, yang di transfer langsung kerekening masing-masing penerima, dengan didampingi

oleh tenaga pendaping program dan koordinator PKH kabupaten, adalah merupakan kebijakan yang sangat efektif dan tepat sasaran karena sangat bermanfaat bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) khususnya masyarakat kurang mampu.

2. Dimensi Kondisi Sosial Ekonomi

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan yang selama ini berjalan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato maka peneliti melihat dari segi sosial dan ekonomi masyarakat di desa.

Oleh karena itu peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan PKH, seperti yang disampaikan oleh informan selaku pendamping PKH kecamatan dengilo, pada tanggal 13 Desember 2021 :

"Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan sebagai pendamping program dari kementerian sosial Republik Indonesia, bahwa kondisi masyarakat di kecamatan dengilo yang terdiri dari 5 (lima) desa, memang banyak masyarakat yang sangat memprihatinkan atau berada dibawah garis kemiskinan atau banyak terdapat keluarga kurang mampu yang di sebut dengan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagian besar pekerjaan masyarakatnya adalah bertani, tukang, buruh bangunan, dan serabutan dalam sebagai penyambung hidup sehari-hari. Selain itu banyak anak-anak putus sekolah baik SD, SMP dan tidak melanjutkan ke sekolah tingkat atas karena dipengaruhi oleh ketidakmampun mereka untuk membiayai anak-anak untuk melanjutkan pendidikan sehingga, menurut saya program PKH ini sangat tepat sasaranya di wilayah kecamatan dengilo" (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Pernyataan tersebut di dukung oleh informan Kepala Seksi Kesejahteraan Kantor Camat Dengilo, yang diwawancarai peneliti tanggl 14 Desember 2021, yang dinyatakan berikut ini :

"Menurut saya program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat adalah sangat tepat, mengingat banyak masyarakat sangat miskin di wilayah kecamatan dengilo ini yang sehari-hari terkadang sulit memenuhi kebutuhan sandang, papan, baik untuk kesehatan maupun pendidikan, sehingga dengan adanya PKH masyarakat penerima manfaat sangat senang mendapatkan bantuan PKH, alhamdulilah setidaknya

sudah dapat membantu meringankan kebutuhan mereka, dan PKH ini juga sebagai stimulus bagi masyarakat miskin untuk menyadarkan kepada mereka akan pentingnya menjaga kesehatan dan memperhatikan pendidikan anak-anak mereka sehingga dapat berguna bagi masa depan". (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Lebih lanjut fasilitator program kecamatan dengilo, ketika di mintai tanggapannya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengilo di katakana bahwa :

"Kondisi ekonomi kelompok penerima manfaat PKH di kecamatan dengilo ini rata-rata sangat memprihatinkan, dimana yang mendapatkan bantuan PKH ini adalah orang-orang yang memang tidak mampu dan tergolong pada cluster paling bawah, seperti ibu rumah tangga, buruh kasar atau buruh harian lepas, dan tukang cuci, yang tidak memiliki pendapatan tetap, dan para janda yang masih memiliki anak usia sekolah dan lain sebagainya"(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut diats, berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat penerima manfaat PKH di kecamatan dengilo, maka dalam cermatan peneliti bahwa kebijakan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di wilayah kecamatan dengilo memang sangatlah tepat, karena dari pengamatan peneliti sebagian besar masyarakat di wilayah kecamatan dengilo berada dibawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan sentuhan program-program berupa bantuan dari pemerintah dalam rangka menyambung hidup dan kehidupan mereka sehari-hari.

3. Dimensi Sumberdaya Manusia

Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam kebijakan Program Keluarga Harapan di kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, peneliti menitikberatkan pada sumber daya manusia di lapangan dengan memfokuskan sumber datanya atau narasumber yang mengerti dan melaksanakan Program keluarga Harapan (PKH), informan tersebut adalah koordinator pendamping PKH Kabupaten Pohuwato dan pendamping PKH wilayah kecamatan dengilo. Adapun pertanyaan peneliti ajukan yaitu mengenai syarat menjadi pendamping PKH seperti yang disampaikan oleh informan selaku koordinator Pendamping PKH Kabupaten Pohuwato (VR) ketika di wawancarai peneliti tanggal 15 Desember 2021 :

"Keberadaan pendamping program PKH langsung di rekrut oleh Kementerian Sosial RI, dengan memenuhi persyaratan dan melalui tahapan seleksi administrasi, setelah itu calon pendamping harus mengikuti seleksi berkaitan dengan kompetesi bidang. Kemudian syarat utama adalah memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 dan S1 atau sarjana. Adapun tahapan seleksi sebagai pendamping PKH salah satunya mengikuti test tertulis dengan persaingan yang ketat, hal ini yang harus di lalui oleh calon pendamping PKH seperti yang pernah saya lalui" (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Hal senada juga di sampaikan oleh Pendamping PKH wilayah kecamatan dengilo ketika ditemui peneliti berkaitan dengan syarat untuk menjadi pendamping, dikatakan berikut ini :

"Untuk menjadi pendamping PKH ini, kami harus mendaftar sebagai calon pendamping PKH kementerian sosial RI yang dilakukan secara online melalui situs ssdm.pkh.kemsos.go.id/site/login3, Kemudian kami harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah di uraikan melalui situs tersebut, setelah itu mengikuti seleksi seperti psikotes dan seleksi kompetensi bidang sebelum dinyatakan lulus sebagai pendamping yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan di kecamatan berdasarkan kuota yang telah di tentukan" (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan di lapangan, disamping pendamping PKH melalui berbagai tahapan dalam seleksi sebagai syarat untuk menjadi pendamping PKH, para pendamping tersebut yang di nyatakan lulus untuk mendampingi program kementerian sosial RI, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pendamping yang dilaksanakan oleh kementerian sosial terkait dengan tugas mereka sebagai pendamping, seperti yang disampaikan oleh informan selaku Koordinator pendamping PKH kabupaten pohuwato yakni (VR) terkait dengan diklat yang di ikuti dinyatakan berikut ini :

"Untuk menjadi pendamping PKH ini memang harus melalui berbagai macam tahapan sebelum turun langsung melakukan pendampingan dilapangan, karena di samping mengikuti seleksi dan test sebagai syarat pendamping, setelah dinyatakan lulus, maka kami harus mengikuti pelatihan mandiri dari kementerian sosial RI berupa pelatihan Family Development Session (FDS) atau

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2KP), pelatihan ini dimaksudkan agar pendamping bukan hanya sekedar memberikan pendampingan penyaluran bantuan PKH, melainkan kami juga sebagai pendamping berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat KPM agar dengan adanya PKH ini mereka dapat merubah perilaku dan pola pikir agar dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Dalam pelatihan itu pula kami mendapatkan buku panduan atau modul tengang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, penyandang disabilitas dan kesejahteraan lansia sebagai panduan dan petunjuk bagi pendamping didalam menjalankan tugasnya". (Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut berkaitan dengan perekrutan sumber daya manusia dalam hal pendamping PKH, peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk menjadi pendamping PKH kementerian sosial RI, tidak terlalu sulit dan juga dapat dikatakan tidak mudah, karena setiap calon mendamping yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi pendamping PKH, harus memenuhi kualifikasi atau latar belakang pendidikan minimal D3 dan S1, kemudian wajib mengikuti beberapa tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, dan test tertulis, setelah dinyatakan lulus test tersebut dan menjadi pendamping PKH, mereka di wajibkan lagi mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh kementerian seperti pelatihan mandiri FDS/P2KP, sebagai bekal mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping.

4. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Berkaitan dengan Karakteristik Agen Pelaksana dalam implementasi kebijakan PKH, dalam penelitian ini peneliti fokuskan kepada strukutur birokrasi PKH atau siapa saja yang terlibat di dalam suatu kebijakan atau program serta bagaimana alur proses pelaksanan program dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap program PKH di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato baik yang berada di dalam struktur pelaksana PKH maupun yang diluar struktur namun terlibat dalam pelaksanaan PKH, hal ini seperti penjelasan yang diberikan oleh informan selaku Koordinator PKH Kabupaten Pohuwato yang peneliti wawancarai, pada tanggal 18 Desember 2021 menyatakan berikut ini :

"Sesuai dengan Buku pedoman dan Buku petunjuk pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH) tentang strukutur birokrasi dan alur serta siapa saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanan PKH sampai di kecamatan, sudah di atur langsung dari pusat, yaitu Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di bawah Kementrian sosial. Alurnya dimulai dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat yang merancang dan mengelola persiapan pelaksanaan program, UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi ditingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu di UPPKH Kabupaten/Kota melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang didapatkan dari kecamatan itu yang diteruskan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya tentang informasi data penerima bantuan. Kemudian pelaksana PKH di daerah seperti di Pohuwato melalui Dinas Sosial memiliki peran mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberikan bantuan jika diperlukan. Selain itu struktur pelaksana PKH di bawahnya atau dilapangan adalah Pendamping PKH dan Operator PKH. Kunci utama keberhasilan pelaksanaan PKH adalah pendamping PKH, karena pendampinglah yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program ditingkat kabupaten /kota. Tugas pendamping itu termasuk juga melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmenya. Dalam pelaksanaan PKH juga ada yang dikatakan tim koordinasi yang membantu kelancaran program ditingkat Provinsi yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. Kemudian agen pelaksana yang diluar struktur PKH namun berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH ini yaitu lembaga pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pelayanan pendidikan di setiap kecamatan dimana PKH ini dilaksanakan"(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas yang disingkronkan dengan temuan peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Karakteristik agen pelaksana dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup struktur birokrasi. Struktur Birokrasi PKH adalah alur pertanggungjawaban proses pelaksanaan PKH dari pusat sampai ke

Kabupaten/Kota. Strukutur birokrasi agen pelaksana PKH sudah di atur langsung dari pusat, yaitu Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di bawah Kementrian sosial. Dimana ketua dari Tim koordinasi nasional PKH di pusat yaitu Mentri Sosial, dan pelaksana PKH nya yaitu Direktorat Jaminan sosial Keluarga Direktorat Jenderal perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk pelaksana PKH di daerah, adalah Dinas/instansi sosial yang membidangi urusan perlindungan dan jaminan sosial dalam hal ini instansi yang membidangi PKH di Kabupaten Pohuwato adalah Dinas Sosial.

Dari temuan peneliti juga menunjukan bahwa Agen Pelaksana PKH wilayah kecamatan dengilo adalah terdiri dari 2 (dua) pendamping yaitu Djumedi Sabir dan Lindawati Rahim memiliki karakteristik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), bertempat tinggal di wilayah kecamatan dengilo, bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani, tidak ada kontrak kerja dengan pihak lain, sehingga menurut hemat peneliti bahwa kedua pendamping tersebut pantas dan dianggap layak serta memenuhi syarat sebagai pendamping PKH di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato.

5. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi

Berkaitan dengan komunikasi antar organisasi yang dilakukan dalam program keluarga harapan (PKH) di kecamatan dengilo ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan tentang bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana PKH dalam menjalankan tugasnya, hal ini seperti apa yang di sampaikan oleh (DS) selaku pendamping PKH di kecamatan dengilo berikut ini :

"Dalam menjalin komunikasi, kami sering melakukan pertemuan sekali dalam sebulan dengan Koordinator pendamping Kabupaten, fasilitator kecamatan, pendamping PKH di desa, serta pelaksana dari dinas sosial, dimana membahas dan hal-hal yang menjadi masalah atau kendala dalam proses penyaluran bantuan PKH, maupun keluhan yang datang keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam pertemuan tersebut semua dibahas dan dicarikan solusinya"(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menemui koordinator PKH Kabupaten, mempertanyakan hal yang sama, tentang komunikasi antar organisasi dalam implementasi PKH di kecamatan dengilo dinyatakan berikut :

"Disamping komunikasi sesama pelaksana dilapangan, kami juga sering berkomunikasi dan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam PKH ini, seperti dari puskesmas selalu menyampaikan data ibu hamil dan data balita yang selalu memeriksanakan kesehatannya, kemudian juga dari UPT dinas pendidikan kecamatan dengilo, selalu memberikan informasi dan data-data peserta didik PKH"(Transkrip Wawancara : Desember 2021).

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut diatas berkaitan dengan komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan dengilo menunjukan bahwa, komunikasi antar organisasi dalam PKH di kecamatan dengilo berjalan dengan efektif dimana, komunikasi tersebut terjalin diantara coordinator pendamping PKH kabupaten pohuwato dengan fasilitator kecamatan, para pendamping PKH di tingkat kecamatan serta pihak-pihak terkait dengan program tersebut. Adapun bentuk komunikasi yang terjalin dalam setiap pertemuan yang agendakan satu bulan sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH setiap bulan, begitu pula keluahan-keluhan dari Keluarga penerima manfaat juga menjadi topik komunikasi dalam pertemuan tersebut, sehingga semua permasalahan dapat segera diatasi dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi antar satu sama lain. Selain komunikasi yang terjalin antar pendamping dan pihak terkait sebagai pelaksana PKH di lapangan, komunikasi dan koordinasi juga senantiasan di bangun dengan pihak eksternal PKH seperti puskesmas selaku mirta PKH yang setiap saat memberikan informasi berupa data ibu hamil serta balita yang tercover dalam PKH, disamping itu UPT Dinas pendidikan kecamatan juga sering memberikan informasi berkaitan dengan peserta didik yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH, sehingga hal tersebut dapat memudahkan komuniasi antar organsiasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan program keluarga harapan (PKH) di khususnya di kecamatan dengilo.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah program yang di sebut Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebuah bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Para pelaksana kebijakan tersebut diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Implementasi Program Keluarga Harapan di dengilo Kabupaten Pohuwato adalah suatu keadaan yang menunjukkan kegiatan pelaksanaan bantuan dana Program PKH untuk pencapaian tujuan ke masyarakat RTSM di Kecamatan Dengilo yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain kata proses implementasi dapat di lihat dari sejauh mana para pelaksana kebijakan PKH dapat melaksanakan tugas pokoknya atau sudah mencapai semua sasarannya.

Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan ukuran implementasi kebijakan dengan mengacu pada 5 (lima) indikator implementasi yang bersumber dari Van Meter dan Van Horn dalam Indiahono (2009: 38) yakni : Standar dan Sasaran Kebijakan, Kondisi Sosial Ekonomi, Sumberdaya, Karakteristik badan pelaksana, dan Komunikasi antar organisasi. Adapun uraian hasil penelitian dan temuan di lapangan adalah berikut ini :

1) Standard dan sasaran kebijakan PKH

Hasil penelitian menunjukan bahwa Sasaran kebijakan dari program keluarga harapan (PKH) adalah melalui proses pendataan masyarakat atau RTSM yang berhak mendapatkan PKH di kecamatan dengilo, yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana proses pendataannya harus memenuhi komponen sasaran masyarakat atau keluarga miskin berupa Ibu hamil, Anak usia dini, SD, SMP, SMA, Disabilitas berat, serta Lansia, kemudia bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Selain itu dari hasil wawancara juga didapatkan

bahwa masih terdapat masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terakomodir pada program keluarga harapan, padahal termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Namun peneliti dari temuan peneliti dilapangan didapatkan bahwa masyarakat yang tidak terakomodir dalam program keluarga harapan melalui kementerian sosial menurut Kasie Kesejahteraan Kantor Camat Dengilo sudah tercover dalam bantuan non tunai bersyarat untuk program layanan inovasi sosial menuju masyarakat sejahtera (Lomaya) yang merupakan salah satu program unggulan dinas sosial kabupaten pohuwato yang besaran dan nilai bantuannya hampir sama dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dari kementerian sosial RI.

2) Kondisi Sosial Ekonomi

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di wilayah kecamatan dengilo memang sangatlah tepat, karena dari pengamatan peneliti sebagian besar masyarakat di wilayah kecamatan dengilo berada dibawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan sentuhan program-program berupa bantuan dari pemerintah dalam rangka menyambung hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Terdapat sebagian masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh lepas yangf sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya dalam pekerjaan tertentu, dari kelima desa di kecamatan dengilo sebagian besar tergolong masayarakat miskin, sehingga dengan adanya bantuan PKH sedikitnya dapat meringankan kebutuhan masyarakayt miskin sehari-hari meskipun tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan mereka, namun bantuan berupa PKH adalah salah satu solusi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan terutama menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan memperhatikan pendidikan untuk masa depan.

3) Sumberdaya Pelaksana

Berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan di lapangan, disamping pendamping PKH melalui berbagai tahapan dalam seleksi sebagai syarat untuk menjadi pendamping PKH, para pendamping tersebut yang di nyatakan lulus untuk mendampingi program kementerian sosial RI, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pendamping yang dilaksanakan oleh kementerian sosial terkait dengan tugas mereka

sebagai pendamping. Untuk menjadi pendamping PKH kementerian sosial RI, tidak terlalu sulit dan juga dapat dikatakan tidak mudah, karena setiap calon mendamping yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi pendamping PKH, harus memenuhi kualifikasi atau latar belakang pendidikan minimal D3 dan S1, kemudian wajib mengikuti beberapa tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, dan test tertulis, setelah dinyatakan lulus test tersebut dan menjadi pendamping PKH, mereka di wajibkan lagi mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh kementerian seperti pelatihan mandiri FDS/P2KP, sebagai bekal mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping. Dimana dalam pelatihan tersebut mereka melaksanakan proses belajar terstruktur guna mengedukasi KPM agar PKH ini bukanlah program jangka panjang atau seumur hidup KPM, melainkan dampak adanya PKH bisa merubah perilaku dan pola pikir masyarakat penerima bantuan agar termotivasi dan belajar untuk dapat keluar dari kemiskinan.

4) Karakteristik Badan Pelaksana

Hasil penelitian menunjukan bahwa Karakteristik agen pelaksana dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup struktur birokrasi. Struktur Birokrasi PKH adalah alur pertanggungjawaban proses pelaksanaan PKH dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota. Strukutur birokrasi agen pelaksana PKH sudah di atur langsung dari pusat, yaitu Kementrian Sosial, mengingat program ini merupakan program perlindungan sosial di bawah Kementrian sosial. Dimana ketua dari Tim koordinasi nasional PKH di pusat yaitu Mentri Sosial, dan pelaksana PKH nya yaitu Direktorat Jaminan sosial Keluarga Direktorat Jenderal perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk pelaksana PKH di daerah, adalah Dinas/instansi sosial yang membidangi urusan perlindungan dan jaminan sosial dalam hal ini instansi yang membidangi PKH di Kabupaten Pohuwato adalah Dinas Sosial. PKH memiliki Pedoman Pelaksanaan PKH, dimana di dalam pedoman tersebut, sudah dijelaskan secara rinci mengenai PKH, beserta kelembagaan yang terlibat hingga struktur dan pembagian tugas untuk setiap implementor.

5) Komunikasi Antar Organisasi

Hasil penelitian menunjukan komunikasi antar organisasi dalam PKH di kecamatan dengilo berjalan dengan

efektif dimana, komunikasi tersebut terjalin diantara coordinator pendamping PKH kabupaten pohuwato dengan fasilitator kecamatan, para pendamping PKH di tingkat kecamatan serta pihak-pihak terkait dengan program tersebut. Adapun bentuk komunikasi yang terjalin dalam setiap pertemuan yang agendakan satu bulan sekali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan PKH setiap bulan, begitu pula keluahan-keluhan dari Keluarga penerima manfaat juga menjadi topik komunikasi dalam pertemuan tersebut, sehingga semua permasalahan dapat segera diatasi dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi antar satu sama lain. Selain komunikasi yang terjalin antar pendamping dan pihak terkait sebagai pelaksana PKH di lapangan, komunikasi dan koordinasi juga senantiasan di bangun dengan pihak eksternal PKH seperti puskesmas selaku mirta PKH yang setiap saat memberikan informasi berupa data ibu hamil serta balita yang tercover dalam PKH, disamping itu UPT Dinas pendidikan kecamatan juga sering memberikan informasi berkaitan dengan peserta didik yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH, sehingga hal tersebut dapat memudahkan komuniasi antar organsiasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan program keluarga harapan (PKH) di khususnya di kecamatan dengilo.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Dengilo dapat dinyatakan telah tepat sasaran dan tujuan dari pelaksanaan PKH telah tercapai dengan baik mulai dari mekanisme dan prosedur, kesesuaian jumlah bantuan yang diterima oleh peserta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan PKH, begitu juga dengan manfaat dana PKH yang sudah meringankan beban peserta PKH baik dibidang pendidikan maupun kesehatan serta kesejahteraaan sosial.

Sumberdaya dalam pelaksanaan PKH di kecamatan Dengilo sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya, selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan

langsung dari Kementerian Sosial RI, terkait pelaksanaan PKH.

Kondisi Sosial Ekonomi di kecamatan Dengilo banyak masyarakat atau KPM memiliki kondisi sosial atau ekonomi yang memprihatikan,di sebabkan tingkat pendidikan,skill, kesadaran masyarakat atas pendidikan dan kesehatan masih rendah.

Karakteristik agen pelaksana atau pendamping KPM benar-benar memberdayakan diri mereka sendiri sebagai obyek dan pelaksanan pembangunan serta memberikan motivasi kepada KPM.

Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik dan lancar ini dapat dilihat dengan adanya pembagian struktur organisasi dan pembagian tugas yang cukup baik dan memiliki pertemuan secara formal yang dilakukan sekali dalam waktu satu bulan.

Saran

Setelah melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, maka ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh penulis sebagai sumbangsih pemikiran dari kajian ilmiah.

Daftar Pustaka

Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebiajakan Publik.Alfabeta. Bandung

Ainur Rohman, Ahmad & dkk. 2010.Reformasi Pelayanan Publik. Averroes Press. Malang .

Anderson, James E. 1984. Public Policy Making. Holt, Rinehart and Wiston New York

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Fadillah, 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Surabya : Pustaka Pelajar

Hesel dan Tangkilisan, 2003, Kebijakan Publik Yang Membumi, Yogyakarta: Lukman Offset

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media. Yogyakarta

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Univesitas Indonesia (UI Press).

Mukhtar dan Sajogyo, 2000, Masalah Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta : Puspa Swara, Anggota IKAPI

Pedoman umum program keluarga harapan (PKH).2017

Sjafari, Agus, 2014, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok, Yogyakarta : Graha Ilmu

Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta

Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta.

Zainal, said, 2004, Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah